



Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta.

## Dua Ekonom: Geliatkan Kembali Belanja Pemerintah

**SURABAYA PAGI** - Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan efisiensi anggaran yang awalnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan belanja negara justru menunjukkan efek berantai yang kontraproduktif. Pertumbuhan belanja pemerintah yang kontraksi sebesar -1,38% yoy turut melemahkan kinerja ekonomi.

“Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa pemotongan belanja publik mengurangi denyut aktivitas ekonomi di banyak sektor, terutama di daerah,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025). Ketika anggaran transfer ke daerah turut ditekan, pilihan daerah untuk membiayai infrastruktur dan program sosial disebut menjadi sangat terbatas. Padahal selama ini APBD menjadi penopang penting penciptaan lapangan kerja dari infrastruktur desa dan perlindungan sosial.

Wahyudi juga menyoroti hasil efisiensi yang sebagian besar justru dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal program baru tersebut dinilai belum menghasilkan nilai tambah ke ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Sementara itu banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak berjalan karena tidak ada anggaran akibat efisiensi, pendamping desa juga banyak yang dirumah-

kan, padahal BLK dan pendamping desa adalah penggerak penciptaan lapangan kerja di sektor riil,” ucap Wahyudi.

Terpisah, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan saat daya beli masyarakat sedang ambruk. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat di bawah 5% dalam beberapa kuartal terakhir.

Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023 yakni sebesar 5,05%. Setelahnya yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 tumbuh 4,93%, kuartal III-2024 tumbuh 4,91%, kuartal IV-2024 tumbuh 4,98% dan kuartal I-2025 tumbuh melambat ke 4,89%.

“Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah. Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil, juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” ucap Arief.

Utuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di level 5% pada sisa kuartal tahun ini, Arief menilai belanja pemerintah harus kembali digeliatkan. ■ **ec, jk, rmc**

## Prabowo Intruksikan HGU-HGB, Habis, Kembalikan ke Negara

**SURABAYA PAGI** - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusrön Wahid, untuk mengecek konsesi hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB) yang sudah habis. “Pak Nusrön, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo. Kembalikan ke negara,” kata Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Presiden mengingatkan agar jangan sampai ada aset milik negara yang tidak terlacak dan akhirnya tidak bisa dikuasai kembali oleh negara. Menurut Prabowo, banyak pemimpin yang tidak mengerti soal keberadaan aset pemerintah. “Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan. Saya minta menteri-menteri kaji. Menteri-menteri yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ujarnya.

Prabowo Mau Bertemu Forum Purnawirawan TNI yang Tuntut Gibran Dicopot Baca juga: Prabowo Sebut Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah “Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti tiga kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang nggak jelas,” imbuhnya. Menurut Prabowo, Indonesia sebenarnya memiliki aset yang sangat besar. Ia kemudian menyinggung aset pemerintah di Senayan dan Kemayoran. “Selama sekian puluh tahun Senayan itu enggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai itu. Kita lupa selain Senayan ada lah sekitar 200 hektare kurang lebih, Menteri BUMN bener? Mensesneg bener? Ternyata ada lagi Kemayoran 400 hektare lebih,” ucapnya. “Kompleks GBK itu nilainya saya diberi tahu pengusaha nilainya 25 miliar dollar



Presiden Prabowo Subianto (kiri) disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pengantar saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta.

sesneg bener? Ternyata ada lagi Kemayoran 400 hektare lebih,” ucapnya. “Kompleks GBK itu nilainya saya diberi tahu pengusaha nilainya 25 miliar dollar 10 tahun lalu, jadi sekarang mungkin nilainya naik, mungkin

10 tahun lalu, jadi sekarang mungkin nilainya naik, mungkin

### BADAL HAJI

HAJI AMANAH  
(Haji yang diwakilkan)

Juga Menerima  
“BADAL UMROH”

SUDAH TERMASUK :  
Sertifikat yang dipigora,  
Air Zam-zam, Sajadah  
& Jam dinding

pastikan hubungi  
“Spesialis Badal Haji”

**HANYA**  
Rp **8** **JUTA**  
Saja

**KBIHU PESAWAT**  
(Pedepokan Samudra Shalawat)

Jl. Tenggilis Lama 3B No. 48 Surabaya  
Telp : (031) 8492856, (031) 8430668  
HP : 0821 3190 9393, 0857 9920 9393

## Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pemkot Gandeng BPN Permudah Pengurusan Sertifikat Tanah

**SURABAYA PAGI**, Surabaya - Sulit dan rumitnya, serta mahalnya pengurusan sertifikat tanah di Kota Surabaya menjadi keluhan warga Surabaya. Merespon keluhan warga ini Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar ada program dari Pemkot Surabaya untuk mempermudah warga mengurus sertifikasi tanah.

Menurut Laila Mufidah sertifikasi tanah di Surabaya saat ini perlu dilakukan akselerasi. Karena warga di Surabaya yang mengimpikan agar tanah yang tempat bersertifikat hak milik. Tanah waris, kepemilikan yang jelas tanpa sengketa, atau dari akta jual beli yang sah mestinya bisa lebih cepat. Maka dari itu perlu intervensi dan sentuhan Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan masalah klasik ini.

“Pemkot harus hadir memfasilitasi problematik sertifikat tanah warganya. Dengan menjalin kerja sama dengan BPN agar warga bisa mendapat layanan dan memudahkan dalam sertifikasi tanah,” kata Laila Mufidah, Selasa (6/5).



Ilustrasi pelayanan masyarakat.

Pimpinan DPRD Surabaya ini mendesak agar ada percepatan dan akselerasi dalam mengurus sertifikat tanah melalui program Pemkot. Bisa diinisiasi dengan program kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Seperti halnya Pemkot menggandeng Pengadilan Negeri Surabaya untuk program Lontong Balap (Layanan Online Terpadu One Gate System bersama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri). Laila mengimpikan lontong balap yang sama dengan BPN.

Menurut Laila warga Surabaya saat ini jengah dan putus asa saat mengurus sertifikat tanah. Prosesnya lama dan warga akhirnya putus asa. Meski warga menempati tanah-tanah sendiri dengan dokumen yang sah.

Mulai dari Petok D, hasil akta jual beli, hingga riwayat tanah yang sah. Semua dilengkapi. Namun saat memproses pengajuan sertifikat tetap saja sulit. Warga malah takut dikenakan biaya tinggi.

Dan Laila mendukung penuh jika Pemkot Surabaya menginisiasi untuk berkolaborasi dengan BPN dalam memberikan layanan sertifikasi tanah. Bisa dengan

program sertifikasi massal yang dikoordinir kelurahan. Laila menjelaskan, sebenarnya saat ini ada program pengurusan sertifikasi tanah dengan sistem digital milik Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun nyatanya warga juga masih sangat kesulitan mengakses layanan tersebut.

Laila bahkan mempertanyakan pgoram layanan online yang demikian. Kes-

annya online tapi belum bisa memberi percepatan layanan pada masyarakat.

Saat menemui langsung warga, Laila menjadi tahu sendiri bahwa warga sangat kesulitan mengurus sertifikat tanah di daerahnya. Sertifikat tanah ini menjadi dokumen impian semua warga.

Hampir semua warga di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, mengeluhkan tidak mudahnya mengurus sertifikat tanah milik mereka sendiri. Tidak hanya tanah di kampung tapi juga tanah kavling.

Ada sejumlah warga yang sudah bisa mengakses. Namun mereka kembali terkendala hingga memilih melaporkan ke kelurahan. Namun di kelurahan juga angkat tangan karena pihak kelurahan menyebut tidak tahu menahu.

“Ada warga yang menyebut pihak kelurahan meminta warga mengurus sendiri. Tidak perlu melibatkan kelurahan. Alasannya diklaim mudah. Nyatanya warga kesulitan,” ucap Laila.

Perempuan asli Kutisari ini mendesak agar otoritas pertanahan melakukan so-

sialisasi dengan baik kepada warga. Sebaiknya jangan berjalan sendiri atas nama institusi BPN tapi gandeng Pemkot melalui kecamatan atau kelurahan.

Libatkan RT dan RW untuk menawarkan layanan sertifikasi tanah yang memudahkan. Bukan bikin rumit dan membuat warga takut. Takut warga akan dikenakan biaya tinggi saat mengurus sertifikat tanah.

Dokumen sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang tidak hanya menyangkut hak kepemilikan legal, tetapi juga menjadi jaminan masa depan bagi keluarga.

Pemkot dan pemerintah pusat melalui BPN harus hadir memberikan solusi untuk mempermudah warga memperoleh hak sertifikat tanah miliknya sendiri. Kecuali tanah sengketa dan riwayat tidak jelas, boleh saja lama.

“Jangan sampai persoalan sertifikasi ini dibiarkan berlarut-larut. Selain berpotensi menimbulkan sengketa, juga dapat menjadi beban disisi regulasi, pajak, maupun biaya administrasi ke depan,” pungkas Laila. ■ **Adv/Alq**

## Laila Mufidah Usulkan Pemkot Kembali Gelar Sertifikasi Masal

**SURABAYA PAGI**, Surabaya - Guna mempermudah pengurusan sertifikat tanah di Surabaya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengusulkan Pemkot Surabaya kembali menggelar program sertifikasi massal.

Dengan menggandeng BPN menggelar program pengajuan sertifikat tanah melalui institusi Pemkot di jenjang kelurahan. Memang sedikit membuat repot kelurahan karena harus mendapat tugas baru mengurus layanan sertifikasi tanah. Namun Pemkot bisa mengatur jadwal layanan dan penempatan tenaga yang memadai.

Agar tidak membludak juga bisa

memberi persyaratan khusus. Setiap warga yang memenuhi kualifikasi bisa mendapat kuota. “Termasuk warga gakin harus prioritas dalam mengurus sertifikat tanah,” kata Laila.

Namun Laila mengingatkan kepada warga juga mematuhi semua persyaratan. Jika memang tidak layak karena dokumen belum lengkap harus dilengkapi. Semua dokumen tanah harus clear and clean dulu.

Pemkot bisa membantu untuk menekan biaya melalui Sertifikasi masal. Terutama bagian keluarga miskin atau gakin. Sertifikasi massal sebenarnya pernah digelar di Surabaya.

Diakui sudah sekitar enam atau tujuh

tahun lalu. Entah kenapa program masyarakat itu dihentikan. Ketua RT 02 Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, mendesak Pemkot memfasilitasi sertifikasi massal.

“Sudah lama dan mahal kalau urus perorangan begini. Biasanya malah banyak calo. Ada yang sampai bayar Rp 30 juta untuk urus sertifikat tanah,” kata Riono.

Warganya tidak mempermasalahkan jika memang ada biaya. Tapi jangan sampai jutaan. Namun dia lebih senang jika Pemkot dan kelurahan menggelar sertifikasi massal. Kalau seperti saat ini, perorangan warga sudah malas.

■ **Adv/Alq**



Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah